KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Hak Angket Bakal Alot di Badan Musyawarah Dewan
Tanggal : Sabtu, 18 Februari 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 6

Hak Angket Bakal Alot di Badan Musyawarah Dewan

Partai pengusung yakin pendukung hak angket bakal bertambah.

Agung Sedayu
agung_s@tempo.co.id

TEMPO/DHEMAS REVIYANTO ATMODJO



Fahri Hamzah.

JAKARTA — Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Zainuddin Amali, mengatakan pembahasan hak angket pengangkatan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal alot di Badan Musyawarah Dewan. Sebab, partai-partai koalisi pendukung pemerintah hampir bisa dipastikan akan menghadang pengajuan hak angket yang diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat ini.

Menurut Zainuddin, kemungkinan hak angket gembos di Badan Musyawarah juga cukup besar. "Kalau lihat komposisinya 7:3, ya, koalisi pendukung pemerintah bakal menang di Bamus (Badan Musyawarah)," kata Zainuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Bila gagal lolos di Badan Musyawarah, usul angket ini tidak akan masuk dalam pembahasan di rapat paripurna Dewan.

Meski begitu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yakin pengajuan hak angket terus berjalan hingga rapat paripurna meskipun mayoritas fraksi menolak. "Tetap harus dibawa ke paripurna. Karena, itu hak anggota, bukan hak fraksi,"

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

kata Fahri, kemarin.

Menurut Fahri, meski anggota Dewan tergabung dalam fraksi, mereka bisa bersikap secara individu dalam mekanisme voting. "Karena begitu masuk dalam tema keputusan, aspirasi anggota itu *one by one*, *one man one vote*," ujar dia.

Usul penggunaan angket muncul setelah Kementerian Dalam Negeri menyatakan tidak memberhentikan Ahok—panggilan Basuki—sebagai Gubernur DKI Jakarta meski telah berstatus terdakwa. Ahok saat ini sedang menjalani persidangan karena didakwa melakukan penodaan agama. Sejumlah kalangan menilai semestinya pemerintah pusat memberhentikan Ahok sebagai gubernur karena telah menjadi terdakwa.

Fraksi Partai Gerindra, didukung Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Demokrat, lantas menggulirkan hak angket atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Partai Amanat Nasional disebut juga mendukung hak angket itu. Namun belakangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan tak setuju bila fraksinya terburu-buru mengajukan hak angket tanpa meminta keterangan alasan Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menilai hak angket adalah hak setiap anggota Dewan. Ia mengaku optimistis usul hak angket itu bisa lolos. "Semua bisa terjadi, termasuk dukungan dari partai pendukung pemerintah lainnya," ujarnya.

Sedangkan partai-partai pendukung pemerintah tetap berkukuh akan menghadang usul angket itu. "Kami tidak melihat adanya urgensi pembentukan angket," ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita. Sedangkan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan hak angket itu belum memenuhi syarat utama, yaitu kepentingan masyarakat luas. Alasannya, kasus itu hanya terjadi di lokal Jakarta. Partai politik lain yang menolak pengusulan hak angket itu adalah Partai NasDem, PPP, PKB, dan Hanura. ● ARKHELAUS W. | FRANSISCO ROSARIANS | LARISSA HUDA